Investasi Proyek Tol Medan dan Serpong Rp 11 Triliun

JAKARTA – PT Nusantara Infrastructure memperkirakan investasi pembangunan tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi dan tol Serpong-Balaraja sebesar US\$ 1,125 miliar atau setara Rp 11,25 triliun.

“Rinciannya adalah investasi ruas tol Serpong-Balaraja sebesar US\$ 545 juta atau sekitar Rp 5,45 triliun dan tol Medan-Kuala Namu sebesar US\$ 580 juta atau Rp 5,85 triliun,” kata *Managing Director and Marketing & Corporate Affairs* PT Nusantara Infrastructure Bernardus Djonoputro seusai diskusi yang bertajuk *Challenges and Opportunity for Sustainable Infrastructure Projects in Indonesia*, di Jakarta, Senin (4/3).

Menurut Bernardus, pihaknya siap mengeluarkan setengah dari kewajiban penggunaan dana internal sebanyak 30% dari total kebutuhan proyek tersebut dan sisanya dari dana konsorsium. Sedangkan, 70% pendanaan diharapkan dapat diperoleh dari pinjaman perbankan.

“Namun setengah dari 30% penggunaan dana internal baru digunakan jika kami diputuskan sebagai pemenang dua proyek tol itu. Saat ini kami baru mengeluarkan dana sebesar US\$ 200.000-300.000 untuk prastudi kelayakan,” ujar dia.

Saat ini perusahaan telah dinyatakan lulus prakualifikasi tender yang dilakukan oleh Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT). Perseroan menggandeng konsorsium Posco dan empat bank asal Korea Selatan untuk mengikuti prakualifikasi tender proyek tol Serpong-Balaraja. Sedangkan untuk proyek tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi, perseroan menggandeng perusahaan konstruksi asing Egys.

Lebih jauh, Bernardus optimistis dapat memenangkan tender proyek dua ruas tol itu karena telah berpengalaman mengoperasikan tol di Jawa

dan luar Jawa. Beberapa jalan bebas hambatan itu antara lain adalah jalan tol Pelabuhan Makassar sepanjang 5,95 kilometer (km) yang menghubungkan Pelabuhan Soekarno-Hatta dengan ujung barat Kota Makassar serta tol yang melalui Jembatan Tallo. Proyek lain adalah jalan tol seksi empat Makassar sepanjang 11 km dan tol JORR W1 Kebon Jeruk-Cengkareng.

Di sisi lain, Ketua Panitia Lelang Perusahaan Jalan Tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi dan Serpong-Balaraja Singgih Karyawan mengakui, saat ini sudah ada masing-masing empat perusahaan yang telah lulus prakualifikasi tender untuk pengerjaan tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi dan tol Serpong-Balaraja.

“Tetapi, pemenang tender belum ada karena pembebasan tanahnya belum beres,” ujar dia.

Empat konsorsium yang telah lulus proses prakualifikasi tender untuk salah satu ruas tol Trans-Sumatera tersebut adalah SP Road-PT Prabu Persada, PT Jasa Marga-PT Waskita Karya-PT Hutama Karya, PT Bangun Cipta Sarana, dan PT Nusantara Infrastructure-Egys.

Sementara itu, empat perusahaan yang lulus untuk tol Serpong-Balaraja adalah PT Citra Marga Nusaphala Persada, SP Road-PT Prabu Persada, PT Bumi Serpong Damai-PT Astratel Nusantara-Transindo Karya Investama, dan PT Nusantara Infrastructure-kontraktor asal Korea Selatan.

Sedangkan, Dirjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Djoko Murjanto mengungkapkan, proses pembebasan lahan untuk dua ruas tol itu akan dilakukan. Apalagi saat ini progres pembebasan lahan untuk tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi sudah mencapai 58%. Adapun pembebasan lahan sisanya diupayakan dapat segera dituntaskan.

“Sisanya tinggal 42% dan itu bisa di-

bebaskan karena dimiliki oleh PT Perkebunan Nusantara (PTPN). Kami akan mengkoordinasikan, mudah-mudahan bisa cepat karena sama-sama dimiliki lembaga negara. Tanahnya juga akan kami beli, tidak disewa karena dipakai permanen,” papar Djoko.

Untuk tol Serpong-Balaraja, kata dia, pihaknya masih menunggu dokumen studi kelayakan dari PT Bumi Serpong Damai yang menjadi inisiator pembangunan tol tersebut. Hingga saat ini pemrakarsa jalan tol tersebut belum memberikan dokumen studi kelayakan kepada pemerintah.

“Dokumen itu juga bisa sebagai syarat bahwa proyek itu bisa dilelang,” ujar dia.

Tol Mandek

Terkait adanya pengerjaan tol Trans-Jawa yang mandek, Bernardus mengungkapkan, pemerintah perlu memberi penalti dan insentif untuk para pemegang konsesi ruas tol. Penalti diberikan jika pemegang konsesi tidak mampu mengerjakan proyek jalan bebas hambatan tepat waktu. Kemudian, insentif diberikan kepada para pemegang konsesi yang mengerjakan tepat waktu atau bahkan lebih cepat dari rencana.

“Pemerintah perlu meminta pemegang konsesi untuk serius. Penalti dan insentif perlu diberikan agar pemain tol mau serius,” papar dia.

Menurut Bernardus, pemerintah diminta mencari terobosan inovatif, seperti menggunakan Undang-Undang No 2/2012 di tiga ruas tol Trans-Jawa yang pembangunannya terhambat masalah pembebasan lahan itu.

“Bila perlu, pemerintah bersama pemegang konsesi turun ke lapangan untuk membantu proses pembebasan lahan. Apalagi dari sisi pendanaan, pada umumnya tidak masalah dengan skema 30% ekuitas dan 70% pinjaman perbankan,” papar dia. (ean)